

Tiga Ruas Trans-Sumatera Dipercepat

JAKARTA – Pemerintah akan mempercepat pembangunan tiga ruas jalan tol dalam jalur Trans-Sumatera yang tidak lagi mengalami masalah pembebasan lahan mulai tahun ini.

"Ruas yang mendesak saya harapkan mulai tahun ini bisa dimulai, misalkan ruas-ruas tertentu yang dirasakan sungguh padat," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa sesuai rapat koordinasi di Jakarta, kemarin.

Hatta mengatakan, dua di antara tiga ruas tol tersebut adalah Medan-Binjai dan Palembang-Indralaya, yang proses pembangunan jalan secara keseluruhan dilakukan oleh PT Hutama Karya. Penugasan kepada Hutama Karya sebagai pelaksana pembangunan tol Trans-Sumatera menurut dia sudah ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres). Namun, Hatta belum mengetahui kapan perpres tersebut akan ditandatangani.

"(Kami telah) menyelesaikan draft rancangan perpres tentang penugasan pembuatan Trans-Sumatera kepada Hutama Karya," jelasnya.

Hatta berharap dengan adanya perpres tersebut pembangunan Trans-Sumatera bisa

berjalan lebih cepat. Untuk dana pembangunan, Hatta mengatakan bahwa sumber pembiayaan kemungkinan akan diambil dari penyertaan modal negara (PMN) serta aksi korporasi.

Sebagai catatan, Trans-Sumatera seharusnya sudah dibangun pada 2012. Namun, proses pembangunannya mengalami hambatan karena sejumlah isu, terutama dana. Tol Trans-Sumatera rencananya akan dibangun sepanjang 2.700 km dengan 24 ruas dan nantinya akan menghubungkan Lampung hingga Aceh. Pembangunan jalan tol tersebut diperkirakan menghabiskan dana sekitar Rp150–300 triliun dan selesai pada 2025.

Mantan Menteri Perhubungan tersebut menjelaskan, untuk pembangunan trans-Sumatera, Hutama Karya sudah mengajukan permintaan penyertaan modal negara sebesar Rp5 triliun pada tahun ini dan sisanya Rp10 triliun pada tahun berikutnya. Penyertaan modal negara tersebut akan di-

cairkan secara bertahap. Namun, Hatta meyakini pembangunan Trans-Sumatera tidak akan memakan biaya hingga Rp300 triliun karena harga lahan di Sumatera tidak semahal di Jawa. "Kalau (biayanya) Rp30 miliar per km maka hanya sekitar Rp90 triliun," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto mengungkapkan, bantuan pemerintah terhadap Trans-Sumatera berbeda-beda sesuai dengan ruasnya. Besaran

bantuan akan disesuaikan dengan *internal rate of return* (IRR). "Intinya jalan itu mesti dibangun, berapa pun kekurangannya nanti akan didukung pe-

merintah," tegas Djoko.

Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar menambahkan, penugasan Hutama Karya dalam pembangunan Trans-Sumatera akan terus didukung sampai BUMN tersebut dirasa mampu berdiri sendiri. Dukungan diberikan karena pemerintah menilai proyek tol Trans-Sumatera memang tidak menguntungkan secara finansial.

"Penugasan ini karena jalan-jalan tadi secara finansial tidak *feasible*, makanya harus ditutup dengan anggaran lain. Apakah itu PMN, pinjaman, atau obligasi yang didukung pemerintah," tandasnya.

Namun, Mahendra mengatakan bahwa Kementerian Keuangan masih mengkaji penyertaan modal negara sesuai dengan permintaan Hutama Karya, dengan kekuatan fiskal yang ada. Mahendra belum dapat memastikan alokasi penyertaan modal negara akan dimasukkan dalam APBN-Perubahan 2013 atau APBN 2014. Menurut dia, Kementerian Keuangan sedang mempertimbangkan beberapa usulan pembiayaan.

"Memang sudah ada perencanaan awal, tapi harus diper-tajam dulu proses ini, kita tunggu finalnya saja daripada berubah-ubah lagi," tuturnya.

● maesaroh



Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa (kanan) memimpin rapat koordinasi mengenai jalan tol Trans-Sumatera, di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, kemarin. Dalam rapat tersebut, pemerintah menegaskan penugasan PT Hutama Karya sebagai pelaksana pembangunan tol Trans-Sumatera.